



**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN SEKOLAH
BERPRESTASI SD INDUK UNGARAN, TAHUN 2010 – 2017**

Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 dalam Ilmu Sejarah**

Disusun oleh:

Nadila Muflihani

NIM 13030111130021

FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2019

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“La Tahla”

Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya

-QS. Al Baqarah (2):286-

“Cukup orang lain saja yang berbuat jahat terhadap diri kita. Biarkan mereka mau berbicara apa, namun kita tetap memberikan energi positif ke diri mereka. Dampak baiknya pun akan berbalik ke diri kita.”

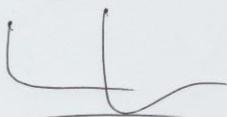
-Mama-

Dipersembahkan kepada:

Almamater, Mama tercinta, Papa yang sudah bahagia di surga-Nya, dan Adik tersayang

Skripsi dengan judul “Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Sekolah Berprestasi SD Induk Ungaran 2010-2017” yang disusun oleh Nadila Muflihani (NIM 13030111130021) telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Program Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada hari, Senin 17 Juni 2019.

Ketua,



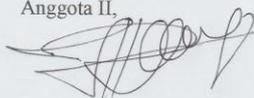
Dr. Dhanang Respati Puguh, M. Hum.
NIP 196808291994031001

Anggota I,



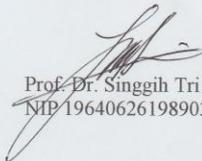
Prof. Dr. Sutejo K. Widodo, M.Si.
NIP 196005151985031004

Anggota II,



Dr. Haryono Rinardi, M.Hum..
NIP 196703111993031004

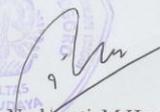
Anggota III,



Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M.Hum.
NIP 196406261989031003

Mengesahkan,
Dekan




Dr. Nurhayati, M.Hum.
NIP 196610041990012001

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Sutejo Kuwat Widodo, M. Si.
NIP 19600515 198503 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN <i>MOTTO</i> DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR ISTILAH	xii
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II SELAYANG PANDANG KABUPATEN SEMARANG DARI TAHUN 2010-2017	 23
A. Kondisi Geografis dan Demografis	23
B. Kondisi Sosial Ekonomi	30
C. Kondisi Sosial Budaya	36
BAB III DINAMIKA STATUS SEKOLAH DARI SDSN – RSBI – SDN RUJUKAN	 57
A. Kebijakan Pendidikan Nasional dan Pendirian Sekolah Dasar Negeri Ungaran 01	 58
B. Profil SDN Ungaran UPTD Pendidikan Kecamatan Ungaran Barat tahun 2010-2017	 62
1. Sarana dan Prasarana	63
2. Kesiswaan	66
3. Visi, Misi, dan Tujuan	67
4. Struktur Organisasi	68
C. Strategi Kurikulum	70
1. Kurikulum	70
a. Materi	71

b. Metode Pengajaran	73
----------------------	----

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENUNJANG

PRESTASI SD NEGERI UNGARAN 01 TAHUN 2010-2017

A. Pembentukan Organisasi Mitra Sekolah	77
1. POMG dan BP3	77
2. Komite Sekolah	78
B. Pembangunan Prasarana	95
1. Kamar Mandi/WC/MCK/Sanitasi	96
2. Musholla	96
3. Jalur Akses Jalan Samping Kelas 1	97
C. Pengembangan Gedung Sekolah	97
1. Ruang Kelas	97
2. Ruang Komputer	98
3. Ruang Bahasa	99
4. Kebun Sekolah	99
D. Peningkatan Kualitas Pembelajaran	100
E. Pengembangan Kegiatan Ekstrakurikuler	102

BAB V SIMPULAN

106

DAFTAR PUSTAKA

108

DAFTAR SINGKATAN

APS	: Angka Partisipasi Sekolah
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
BP3	: Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DIRJEN	: Direktur Jenderal
IMTAQ	: Iman dan Taqwa
IPTEK	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Km	: Kilometer
KTSP	: Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
LCD	: <i>Liquid Crystal Display</i>
LPJK	: Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan
MA	: Madrasah Aliyah
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MK	: Mahkamah Konstitusi
MTs	: Madrasah Tsanawiyah
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
POMG	: Persatuan Orang tua Murid dan Guru
PT	: Perguruan Tinggi
RAPBS	: Rancangan Anggaran dan Pendapatan Sekolah
RAKS	: Rencana Anggaran Kerja Sekolah
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RI	: Republik Indonesia
RT	: Rukun Tangga
RW	: Rukun Warga
SSN	: Sekolah Standar Nasional
SBI	: Sekolah Berbasis Internasional
SD	: Sekolah Dasar
SDN	: Sekolah Dasar Negeri
SDSN	: Sekolah Dasar Standar Nasional
SK	: Surat Keputusan
SLS	: Satuan Lingkungan Setempat
SLTP	: Sekolah Lanjut Tingkat Pertama
SLTA	: Sekolah Lanjut Tingkat Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
UNNES	: Universitas Negeri Semarang
UU	: Undang-undang
UUD	: Undang-undang Dasar
UPTD	: Unit Pelaksana Tekni Dinas

DAFTAR ISTILAH

akademik	: penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan.
akuntabel	: bertanggung jawab, dapat dipahami
animo masyarakat	: hasrat dan keinginan yang kuat untuk berbuat, melakukan, atau mengikuti sesuatu.
<i>centre</i>	: pusat
<i>civitas academia</i>	: masyarakat akademik yang terdiri dari kepala sekolah, para guru, para siswa, mahasiswa, rektor, dosen, pegawai universitas atau pegawai sekolah.
<i>direct experirences</i>	: pengalaman langsung
<i>drop out</i>	: keluar sekolah sebelum waktunya
<i>eksistensi</i>	: kehadiran yang mengandung unsur bertahan
ekstrakurikuler	: kegiatan non-pelajaran yang dilakukan oleh peserta didik sekolah.
<i>favorite</i>	: sesuatu yang diunggulkan
<i>fleksibel</i>	: mudah menyesuaikan
<i>hinterland</i>	: daerah penyangga
indikasi	: tanda-tanda yang menarik perhatian.
inpres	: Instruksi presiden yang merupakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden secara tertulis.
institusi	: lembaga
keppres	: Keputusan Presiden
Komite Sekolah	: Suatu lembaga mandiri di lingkungan sekolah dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arah, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pada tingkat satuan pendidikan.
kompeten	: kemampuan yang cukup untuk melakukan tugas yang diberikan
kreatif	: kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru
koordinasi	: mengatur suatu organisasi atau kegiatan

kupatan	: ritual masyarakat Jawa pasca Hari Raya Idul Fitri
<i>lifeskill</i>	: keterampilan hidup
mengapresiasi	: melakukan pengamatan, penilaian, dan penghargaan
misi	: cara-cara yang dilakukan untuk mencapai visi yang : sudah ditentukan
non akademik	penguasaan dan pengembangan diluar disiplin ilmu : pengetahuan seperti kegiatan ekstrakurikuler.
<i>outing class</i>	: pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik di luar ruangan atau kelas
paguyuban	: suatu perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, didirikan oleh orang-orang yang sepaham untuk membina persatuan di antara para anggotanya.
persepsi	: menafsirkan suatu informasi
produktif	: sesuatu hal yang bisa menghasilkan atau mendatangkan keuntungan besar atau banyak
relatif	: tidak mutlak
relevan	: bersangkutan-paut
<i>regrouping</i>	: penggabungan
<i>scientific-approach</i>	: pendekatan ilmiah
<i>scope</i>	: jangkauan, lingkup
<i>sensitif</i>	: peka
<i>stake-holder</i>	: suatu kelompok masyarakat yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi.
<i>student centered</i>	: proses pembelajaran yang berpusat pada siswa kesatuan
syawalan	: acara maaf-memaafkan
transparansi	: keterbukaan dan pertanggung-jawaban
<i>universal</i>	: umum
<i>vocational skill</i>	: keterampilan yang dikaitkan dengan pekerjaan
visi	: gambaran atau rancangan masa depan

ABSTRAK

Skripsi ini mengambil judul “Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Sekolah berprestasi SD Induk Ungaran, tahun 2010-2017” Pokok permasalahan yang dibahas adalah peran serta masyarakat terhadap SD Induk Ungaran, sehingga mencapai sekolah berprestasi.

Pendidikan sekolah dasar (SD) merupakan jenjang dasar bagi peserta didik dalam menempuh pendidikan. Pendidikan di sekolah dasar mempunyai kontribusi dalam membangun dasar pengetahuan siswa untuk digunakan pada pendidikan selanjutnya, oleh karena itu pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar harus berjalan optimal. Sekolah Dasar Negeri Induk Ungaran, sekolah ini merupakan sekolah dasar di bawah naungan UPTD Pendidikan Kecamatan Ungaran Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang. SDN Ungaran 01 merupakan gabungan dari tiga sekolah, yaitu SDN Ungaran 01, SDN Ungaran 03, SDN Ungaran 06, terletak di satu wilayah di Jl. Diponegoro Ungaran, sangat terkenal dengan segudang prestasi yang sangat membanggakan. Hal ini terlihat dari piala-piala yang berdiri rapi di dalam satu ruangan khusus, lebih dari seribu (1000) dan paigam. Sampai saat penelitian ini diteliti, prestasi dan kualitas dari SDN Ungaran 01 tetap terjaga eksistensinya.

Dalam menerapkan Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah, terdapat keterbatas biaya dan kurang tersedianya sarana dan prasarana maka dari itu pihak sekolah pun membuat suatu lembaga atau organisasi dengan nama Komite Sekolah yang beranggotakan para orang tua murid, para guru, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat. Komite sekolah merupakan sebuah lembaga yang menjadi wadah dari peran serta masyarakat dalam membantu pengembangan sekolah.

ABSCTRACT

This research has topic about “The Role of Society for Developing SD Induk Ungaran achievement from 2010-2017” The main problem that have been researched the role from society to SD Induk Ungaran, until become prestigious school

Primary School (SD) education is the primary stage for education for participant when taking education Primary School (SD) education have contributed for building primary knowledge to student, this primary knowledge will be used for the next level of education, and because of that implementation for study in primary school has to be optimum. In Ungaran regency there is nation primary school its name is SD Induk Ungaran 01, this school is primary school under direction of UPTD Education West Ungaran, Ministry Education and Culture Semarang Regency. SDN Ungaran 01 is very famous with a lot of proud achievement and that things could be seen from many cups in the designed room and until today the quality and achievement of SDN Ungaran 01 still exist

The Implementation of Nation Education Standard by the government, like the limited of fund and the less availability school infrastructure and because of that the school management form a organization while the organization itself named School Committee, the member of school committee is from the student family and the teacher. School Committee is a organization to coordination the role of society for developing school

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Sekolah Berprestasi Induk Ungaran, Tahun 2010-2017”. Skripsi ini disusun untuk menempuh ujian akhir Program Strata I pada Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro Semarang.

Melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, bimbingan, dan petunjuk, baik berupa material maupun spiritual kepada yang terhormat: Dr. Nurhayati, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro dan Dr. Dhanang Respati Puguh, M.Hum. Ketua Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, yang berkenan memberikan izin dan kemudahan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Sutejo Kuwat Widodo, M.Si., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan bekal keilmuan, pengarahan, dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi ini, kepada Dr. Haryono Rinardi, M.Hum. selaku dosen wali, yang sabar memperhatikan perkembangan kemajuan akademik penulis dan seluruh staf pengajar Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.

Terima kasih kepada Drs. Winarto mantan Kepala Sekolah SDN Induk Ungaran 01 tahun 2002-2013, Ibu Rukayah selaku Kepala Sekolah SDN Ungaran 01 tahun 2019 yang memberikan izin untuk melakukan berbagai riset dan wawancara kepada staf guru, Bu Nurul selaku staf TU SDN Ungaran 01 yang memberikan beberapa arsip penting, Bu Dra. Sri Dwi M.Pd mantan Kepala Sekolah SDN Ungaran 01, Prof. Tejo Ketua Komite Sekolah SDN Ungaran 01 tahun 2007-2018, dan Bu Prapti selaku wali kelas VA, Dra. Sunarni, Dr. Sutomo, dan Pak Bambang S.H,M.H pengurus Komite Sekolah dan Ketua Komite Sekolah SDN Ungaran 01 yang memberikan waktunya untuk melakukan beberapa wawancara atas kemudahan dalam memperoleh data-data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini. Terima kasih yang tidak terhingga kepada segenap staf pengajar dan staf administrasi Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, yang telah

memberikan banyak ilmu serta kemudahan dalam urusan perkuliahan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut yang telah bermurah hati meminjamkan sumber-sumber yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini.

Selanjutnya, penulis mempersembahkan karya ini dengan kerendahan hati mengharap Ridho Allah SWT sebagai tanda cintaku kepada wanita kuat dan terhebat yang selalu mendoakan, mencintai, menyayangiku dengan tulus, dan selalu memberi kekuatan hingga penulis berdiri sampai saat ini, ialah ibuku Chairdania dan untuk laki-laki yang selalu berjuang mengorbankan segalanya demi anak-anaknya dengan keringat yang bercucuran yang tak mampu terhitung demi masa depanku dan kini telah bahagia di surga-Nya, ialah ayahku Didi Krisna. Terima kasih kepada adikku tercinta Firda Amalia yang selalu memberikan tawa dan canda dan memberikan kekuatan di saat titik lemah. Untuk kekasihku Adi Dwipurna Arjun yang selalu memberikan waktunya dalam membantu penulis menyelesaikan karya tulis ini, cinta kasih yang telah ia berikan, dan tawa canda yang telah ia tularkan, terima kasih untukmu. Selain itu, ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada kawan-kawan seperjuangan di Departemen Sejarah, Mardika Ardiwinata, Septian Adi Saputra, Dimas Jaka, Adikaresta, Affan Naqris, Novi Sulistyaningsih, Sabrina Noti, serta teman-teman Sejarah angkatan 2011 yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan warna dalam mengarungi bahtera kehidupan di kampus. Teruntuk teman-teman seprofesi di Starbucks Ungaran, Diandra Jenar, Bram, Al amin, kak Tika, Aisha Mentari, Aya, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan yang selalu memberikan semangat untuk tetap menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan baik dalam hal tata tulis maupun isinya, sehingga kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kepentingan ilmu pengetahuan. Akhirnya, penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.

Semarang, 2019

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Salah satu hak yang dimiliki seorang warga negara Indonesia adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Sebagaimana tertuang dalam Amandemen UUD 1945 Pasal 31 ayat (1). Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengusahakan, menyediakan, dan menyelenggarakan pendidikan, tersebut diperkuat dengan ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Posisi pemerintah dalam hal memenuhi hak pendidikan bagi rakyatnya mengacu kewajibannya menyediakan sarana dan fasilitas pendidikan untuk rakyatnya, serta menjamin rakyat mendapat kemudahan mengakses pendidikan.¹

Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga Indonesia menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional. Pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana, dana, lingkungan sosial, ekonomi, budaya, politik, teknologi, dan partisipasi masyarakat. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dapat dikatakan juga bahwa pendidikan merupakan suatu aspek yang harus dipikirkan demi keberlangsungan sebuah negara.²

¹Gunawan A. H., *Kebijakan-kebijakan Pendidikan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hal.21.

²Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan; Konsep, Teori dan Model* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 81.

Di era global untuk dapat berkembang dan bersaing di setiap aspek kehidupan tidak hanya dibutuhkan keunggulan komparatif saja, tetapi juga keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif merupakan nilai lebih yang harus ada. Keunggulan kompetitif ini mulai terbentuk dari pendidikan sejak dini yaitu pendidikan sejak sekolah dasar.³ Pendidikan Sekolah Dasar (SD) merupakan jenjang dasar bagi peserta didik dalam menempuh pendidikan. Pendidikan di SD mempunyai kontribusi dalam membangun dasar pengetahuan siswa untuk digunakan pada pendidikan selanjutnya. Oleh karena itu, pelaksanaan pembelajaran di SD harus berjalan optimal.⁴ Selain itu pemerintah pun membuat program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, yang tercantum di dalam Undang-undang Pendidikan Nasional No. 2/1989. Program ini dibuat agar upaya meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan mewajibkan warga negara Indonesia berusia 7-12 tahun dan 12-15 tahun untuk menamatkan pendidikan dasar enam tahun di Sekolah Dasar dan tiga tahun di Sekolah Menengah Pertama secara merata⁵. Tidak relevan bila di zaman modern ini masih ada anak-anak Indonesia yang mengalami buta huruf dan tidak bersekolah dan agar pemerintah mempunyai penerus bangsa sekaligus meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia melalui pendidikan. Program wajib belajar sembilan tahun telah dicanangkan pemerintah sejak tahun 1994 dan direncanakan tuntas pada tahun 2008. Suksesnya program ini ditandai dengan tercapai angka 95 persen pada tahun 2008. Program wajib belajar sembilan tahun yang dikeluarkan pemerintah melalui Inpres No.1 tahun 1994 pada tanggal 15 April, bukanlah program pertama yang dilakukan oleh pemerintah, nampaknya merupakan kelanjutan program wajib belajar enam tahun yang telah sukses dilakukan⁶. Dengan adanya program wajib belajar dari pemerintah ini, maka standar yang dimiliki oleh

³H.A.R. Tilaar, *Lima Puluh Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisis Kebijakan* (Jakarta: Grasindo, 1995), hlm. 30.

⁴K. A. Aka, "Model Quantum Teaching dengan Pendekatan Cooperative Learning untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran PKn", *Jurnal Pedagogia*, Vol V No.1, ISSN 2089-3033, hlm 35-46.

⁵Marlan Harahap, "Wajib Belajar 9 Tahun" dalam *Selintas Pendidikan Indonesia Di Awal Tahun 2003: Tujuh Isu Pendidikan* (Jakarta: Pusat Data dan Informasi Balitbang Depdiknas, 2003), hlm. 45.

⁶Marlan Harahap, *Wajib Belajar 9 Tahun*, hlm. 53.

pihak sekolah pun juga harus dikuasai dengan baik, agar anak didik bisa memiliki kualitas dan kuantitas yang diharapkan. Standar yang dibicarakan ialah bukan hanya standar dari pihak pengajar, kurikulum, namun juga dari sarana dan prasarana sekolah yang tersedia. Dengan kata lain sekolah di Indonesia harus memiliki beberapa standar yang menjadi ketetapan pemerintah dalam bidang pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Ketetapan pemerintah tersebut tercantum dalam Undang-undang No.20 tahun 2003⁷.

Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan yang dimiliki pemerintah Indonesia. Ada beberapa standar yang harus dimiliki oleh satuan pendidikan yang ada di Indonesia:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi
3. Standar Proses
4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana
6. Standar pengelolaan
7. Standar Pembiayaan Pendidikan
8. Standar Penilaian Pendidikan

Tujuan dan fungsi pemerintah dalam membentuk Standar Nasional Pendidikan ialah sebagai acuan atau dasar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, demi untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas,⁸ membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kehidupan nasional dan global. Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

⁷“Standar Nasional Pendidikan”, <http://bsnp-indonesia.org/standar-nasional-pendidikan/>, diakses pada 20 Maret 2019.

⁸*Badan Standar Pendidikan Nasional*, (<http://litbang.kemdikbud.go.id/index.php>, diakses pada 20 Maret 2019.)

Namun ada berbagai kendala yang dialami oleh beberapa sekolah dalam menerapkan Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti terbatasnya biaya dan kurang tersedianya sarana dan prasarana, maka dari kendala tersebut pemerintah melakukan kebijakan menyediakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk diberikan kepada sekolah-sekolah negeri untuk membantu penyelenggaraan sekolah, tetapi dari dana BOS yang diberikan oleh pemerintah tidak dapat digunakan untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang seharusnya menjadi salah satu poin penting dalam menerapkan Standar Nasional Pendidikan. Maka dari itu pihak sekolah pun membuat suatu lembaga atau organisasi yang dikenal dengan nama Komite Sekolah yang beranggotakan para orangtua murid, para guru, tokoh masyarakat, dan tokoh pendidikan.⁹ Komite Sekolah merupakan suatu badan mandiri yang memberi manfaat terhadap pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Komite Sekolah dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stake-holder* pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan. Tujuan di bentuknya Komite Sekolah dimaksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah.¹⁰ SDN Ungaran 01 yang penulis bahas dalam skripsi ini pun mempunyai sebuah Komite Sekolah. Komite Sekolah yang dimiliki SDN Ungaran 01, anggota komite yang berasal dari perwakilan orang tua siswa berasal dari, paguyuban-paguyuban kelas per kelas yang seluruh anggota, yang dipilih berasal dari anggota paguyuban itu sendiri. Alasan dibentuk Komite Sekolah khususnya SDN Ungaran 01, agar kegiatan para siswa tetap terkontrol sesuai dengan aturan dan memudahkan atau membantu kegiatan para siswa dalam hal dana atau biaya.¹¹

Dalam skripsi ini dibahas salah satu sekolah tepatnya di Kabupaten Semarang, Ungaran, tepatnya terdapat sekolah Negeri SD Negeri Induk Ungaran 01.

⁹Anonim, *Pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*, (Jakarta: Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kegiatan Pembinaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, 2009), hlm. 23.

¹⁰Wawancara dengan Prof. Sutejo, 23 Februari 2019.

¹¹Wawancara dengan Pak Winarto, 15 Januari 2019.

Sekolah ini merupakan sekolah dasar dibawah naungan UPTD Pendidikan Kecamatan Ungaran Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang. Beberapa hal yang menarik dari pembahasan ini ialah, SD Induk Ungaran 01 merupakan gabungan dari tiga sekolah dari SDN Ungaran 01, SDN Ungaran 03, dan SDN Ungaran 06, menjadi satu-satunya Sekolah Dasar Rintisan Sekolah Berbasis Internasional (RSBI)¹² yang terdapat di Kabupaten Semarang. Rintisan Sekolah Berbasis Internasional ialah Sekolah Standar Nasional yang menyiapkan peserta didik berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Indonesia dan bertaraf internasional sehingga diharapkan lulusannya memiliki kemampuan daya saing internasional. Dikatakan sebagai rintisan ialah sekolah-sekolah tersebut dipersiapkan secara bertahap melalui pembinaan oleh pemerintah atau *stake-holders*, dalam jangka waktu tertentu yaitu empat tahun dan dapat diharapkan sekolah tersebut mampu memenuhi kriteria menjadi Sekolah Berbasis Internasional (SBI).¹³ Dalam penyeleksian atau rujukan yang dilakukan oleh pemerintah Semarang, SD Induk Ungaran 01 terpilih menjadi sekolah RSBI karena memenuhi kriteria yang ditetapkan, seperti halnya tersedianya sarana dan prasarana yang memenuhi dalam kegiatan belajar mengajar, termasuk siswa dan para staf guru yang berkompeten. Ketetapan sekolah RSBI berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam pengalamannya, RSBI tak berlangsung lama, karena ada pembubaran dari pemerintah pusat. Hal ini disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 08/01/2013. Dalam keputusannya MK menyatakan bahwa pasal yang mengatur RSBI/SBI bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.¹⁴ RSBI menimbulkan adanya dualisme pendidikan, tingginya biaya pendidikan menimbulkan diskriminasi pendidikan yang rentan terhadap penyelewengan dana, perbedaan antara RSBI/SBI dengan non

¹²Wawancara dengan Ibu Ristina, 08 Februari 2019.

¹³*Kebijakan SBI*, <http://dikdas.kemdiknas.go.id/docs/KebijakanSBI.pdf>, diakses pada 20 Maret 2019.

¹⁴*Putusan MK Bubarkan RSBI*, (<http://www.jpnn.com/read/2013/01/08/153565//Putusan-MK-Bubarkan-RSBI>, diakses 21 Maret 2019.)

RSBI/SBI menimbulkan adanya kestanisasi pendidikan. Hal ini sangat disayangkan oleh pihak sekolah karena dengan adanya status rintisan bertaraf internasional menentukan bagusnya kualitas yang dimiliki oleh sekolah itu sendiri.¹⁵

Walaupun status RSBI telah dihapuskan, SDN Ungaran 01 kemudian berubah menjadi sekolah rujukan, yakni sekolah yang menjadi pusat (*centre*) dalam hal acuan cara pengajaran, kurikulum, maupun prestasi akademis dan non akademis untuk sekolah-sekolah di Kabupaten Semarang, dan sering kali SD Ungaran 01 ini mendapatkan kunjungan dari sekolah di luar Kabupaten Semarang.¹⁶ Pada bulan Januari 2015 SDN Ungaran 01, 03, dan 06 mengalami regrouping sehingga menjadi SD Negeri Ungaran 01. Regrouping ini merupakan ketetapan yang diturunkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, karena sebelumnya tiga sekolah ini berada di dalam satu lokasi yang sama namun berbeda kepemimpinan sekolah dan Pemerintah Kabupaten Semarang menyarankan untuk berdiri di dalam satu kepemimpinan sekolah. SDN Ungaran 01 ini pun sangat dikenal dengan segudang prestasi yang sangat membanggakan. Hal ini terlihat dari piala-piala yang berdiri rapi di dalam satu ruangan khusus. Sampai pemerintah ini dan kualitas SDN Ungaran 01 tetap terjaga eksistensinya, sehingga banyak orangtua murid yang berharap bisa menyekolahkan sang anak di sekolah ini agar sang anak bisa tumbuh dan berkembang menjadi murid yang berprestasi.

Dari beberapa pernyataan diatas dirumuskan beberapa permasalahan untuk penulisan skripsi ini agar berjalan dengan baik dan terarah, yaitu:

1. Bagaimana peran serta masyarakat terhadap, penyelenggaraan pembelajaran di SD Induk Ungaran 01?
2. Bagaimana peran serta masyarakat tersebut diorganisasikan oleh Komite Sekolah sehingga SD Induk Ungaran 01 bisa berprestasi sampai tingkat Nasional?

B. Ruang Lingkup

Setiap penulisan sejarah dituntut untuk menentukan batasan-batasan topik agar diperoleh kejelasan dalam pemahaman. Batasan-batasan yang dimaksud adalah ruang lingkup spasial, ruang lingkup temporal, dan ruang lingkup keilmuan. Penentuan

¹⁵Wawancara dengan Pak Winarto, 15 Januari 2019.

¹⁶Wawancara dengan Ibu Ristinah, 08 Februari 2019.

ruang lingkup menjadikan pembahasan lebih praktis dan mempunyai kemungkinan dikaji secara empiris, dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.¹⁷ Berikut ini adalah ruang lingkup spasial, ruang lingkup temporal, dan ruang lingkup keilmuan dalam skripsi ini.

Pertama, lingkup spasial skripsi ini adalah lingkup wilayah Kecamatan Ungaran. Terletak seluruh SDN 01 Ungaran yang ada di Jl. Diponegoro No.4, Sembungan, Ungaran.

Kedua, lingkup temporal. Secara temporal skripsi ini memfokuskan pada tahun 2010 sampai 2017 Pengambilan periode awal 2010 dengan pertimbangan bahwa pada tahun tersebut merupakan tahun status perjalanan SD Induk Ungaran terjadi, perubahan status sekolah dari Sekolah Dasar menjadi Sekolah Dasar Standar Nasional hingga menjadi Sekolah Dasar Bertaraf Internasional, dan masa akhir dihapusnya RSBI kembali menjadi Sekolah Dasar Standar Nasional, dan menjadi Sekolah Rujukan.

Ketiga, lingkup keilmuan. Lingkup keilmuannya diambil adalah sejarah pendidikan. Oleh karena itu, penggunaan ilmu-ilmu sosial bidang pendidikan sangat dibutuhkan. Dalam hal ini penggunaan ilmu sosial lainnya adalah ilmu sosiologi pendidikan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada latar belakang permasalahan dan batasan ruang lingkup di atas, maka beberapa tujuan untuk memperjelas fokus analisis penelitian yaitu sebagai berikut;

Pertama, mengetahui peran serta masyarakat dalam mendukung kegiatan pembelajaran di SD Induk Ungaran. *Kedua*, mengetahui peran serta masyarakat yang dikoordinasi oleh Komite Sekolah dalam mengembangkan prestasi di SD Induk Ungaran hingga tingkat Nasional.

D. Tinjauan Pustaka

Beberapa pustaka yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti perlu ditinjau dalam skripsi ini. Relevansi pustaka tersebut tidak hanya berkaitan

¹⁷Fischer, dalam Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia: Kumpulan Tulisan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), hlm. 10.

dengan aspek kajian, tetapi juga metodologi yang digunakan. Beberapa pustaka tersebut adalah sebagai berikut.

Pustaka *pertama* adalah karya dari Ary H. Gunawan berjudul *Kebijakan-kebijakan Pendidikan*.¹⁸ Buku ini menggambarkan kebijakan pendidikan yang diterapkan di Indonesia. Sebagian besar pembahasan dalam buku ini mengenai pendidikan di Indonesia pasca tahun 1945. Ary H. Gunawan juga mengulas kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Belanda dan Jepang pada masa penjajahan. Pendidikan pada kedua masa tersebut turut berpengaruh dalam membentuk sistem pendidikan nasional di Indonesia, terutama pendidikan pascaproklamasi 1945 sampai periode sekarang. Relevansi karya Ary H. Gunawan terhadap skripsi ini adalah memberikan gambaran umum mengenai kebijakan pendidikan yang diterapkan pada pendidikan Indonesia. Selain itu juga memberikan gambaran tentang kelemahan serta kelebihan tentang kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dalam memperbaiki mutu pendidikan.

Kelebihan dari buku ini adalah, penjelasan per periode di buku ini sangat jelas dan lengkap. Mulai dari periode 1945 sampai 1966 sampai dengan 2019. Di dalam buku ini juga terdapat aturan-aturan dan undang-undang tentang pendidikan pada tahun-tahun tersebut, terdapat pula gambar berwarna untuk memudahkan pembaca menganalisis, ditulis dengan bahasa yang baku. Kelemahan dari buku ini adalah banyak sekali kata istilah yang tidak dijelaskan di akhir halaman buku.

Pustaka *kedua* adalah artikel karya Ahmad Nawawi yang berjudul *Peran Serta Masyarakat dalam Implementasi Pendidikan Inklusif*.¹⁹ Artikel ini menjelaskan peran serta masyarakat yang terdiri dari orang tua, anggota keluarga, tokoh masyarakat, para pengusaha, profesional pendidikan, profesional medis, dan *stakeholder* perlu digalakan dan ditumbuh-kembangkan secara optimal agar implementasi pendidikan dapat berlangsung dengan baik seperti yang diharapkan oleh masyarakat pendidikan negara. Di dalam artikel ini pun juga dijelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi keberadaan Komite Sekolah, *stakeholder*, dan LSM perlu dipahami oleh seluruh

¹⁸Gunawan A. H., *Kebijakan-kebijakan Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hal.21

¹⁹Nawawi Ahmad, "Peran Serta Masyarakat dalam Implementasi Pendidikan Inklusif" (Jurusan Pendidikan Luar Biasa, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2010).

masyarakat yang berkepentingan dengan terlaksananya pendidikan yang berkualitas dan terdapat pula undang-undang atau peraturan yang mendasari kerja sama kemitraan antara pihak sekolah dengan pemerintah, orang tua, dan kelompok-kelompok masyarakat serta organisasi kemasyarakatan.

Pustaka *ketiga* adalah karya dari Ahmad Susanto berjudul *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*²⁰ Buku ini menggambarkan pembelajaran yang efektif dan berpengaruh terhadap perkembangan siswa Sekolah Dasar, mengupas berbagai teori dan konsep pembelajaran secara detail berikut strategi dan metode pembelajarannya, mulai dari hakikat belajar dan pembelajaran, hakikat pendidikan di SD, prinsip pembelajaran di SD, pembelajaran IPS di SD, pembelajaran IPA di SD, matematika, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan pembelajaran lainnya. Relevansi karya Ahmad Susanto terhadap skripsi ini adalah memberikan arti penting pendidikan tingkat sekolah dasar di Indonesia. Selain itu juga mendiskripsikan pengaruh pendidikan sekolah dasar serta pengembangan kreativitas siswa.

Kelebihan dari buku ini adalah, pengarang menjelaskan secara terperinci dan detail untuk menjelaskan isi buku ini karena pengarang mengetahui secara jelas teori belajar pembelajaran di Sekolah Dasar. Kelemahan dari buku ini adalah pengarang terlalu menjelaskan pengertian secara berulang-ulang walau menurut pendapat orang yang berbeda. Pengarang pun juga menulis tema yang hampir sama secara berulang.

Pustaka *keempat*, adalah skripsi yang berjudul “Studi Analisis Peranan Komite Sekolah SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung” yang disusun oleh Tiara Erwinda.²¹ Skripsi tersebut menjelaskan peran Komite Sekolah di SD Al-Azhar 01 dalam menjalankan peranan sebagai bahan pertimbangan dimulai melalui mengadakan pendataan kondisi sosial ekonomi siswa, menganalisis hasil pendataan, pertimbangan terhadap kegiatan pembelajaran, pertimbangan terhadap visi misi dan tujuan kegiatan sekolah serta dalam penyusunan RAPBS. Di dalam skripsi ini juga dijelaskan mengenai peran Komite Sekolah sebagai *controlling agency* (badan pengontrol) dan

²⁰Gunawan, A. H., *Kebijakan-kebijakan Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hal.21

²¹Tiara Erwinda, “Studi Analisis Peranan Komite Sekolah SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung” (Jurusan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018).

supporting agency (badan pendukung), yang mana dua peran tersebut menjadi acuan pokok dalam mengontrol kegiatan di sekolah dengan mengontrol pelaksanaan program serta mengontrol *output* pendidikan. Pengadaan rapat dewan Komite Sekolah yang bertujuan untuk mensosialisasikan keputusan yang akan diambil terkait dengan pertimbangan-pertimbangan finansial siswa atau besaran biaya sekolah. Bantuan sarana-prasarana yang didapat dari luar pemerintah, mendukung kegiatan pembelajaran yang berlangsung didalam sekolah maupun diluar sekolah.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini membahas aspek pendidikan yaitu merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana, dana, lingkungan sosial, ekonomi, budaya, politik, teknologi, dan partisipasi masyarakat.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pembelajaran berdasarkan makna leksikal berarti, proses, cara, perbuatan mempelajari. Perbedaan esensial istilah ini dengan pengajaran adalah pada tindak ajar. Pada pengajaran guru mengajar, peserta didik belajar, sementara pada pembelajaran guru mengajar diartikan sebagai upaya guru mengorganisasi lingkungan terjadinya pembelajaran. Guru mengajar dalam perspektif pembelajaran adalah guru menyediakan fasilitas belajar bagi peserta didiknya untuk mempelajarinya. Jadi, subjek pembelajaran adalah peserta didik. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pembelajaran merupakan proses organik dan konstruktif, bukan mekanis seperti halnya pengajaran.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa kegiatan pembelajaran yang melibatkan beberapa yaitu: (a). Siswa: seorang yang bertindak sebagai pencari,

penerima, dan penyimpan isi pelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan; (b) Guru: seseorang yang bertindak sebagai pengelola, katalisator, dan peran lainnya yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang efektif; (c) Tujuan: pernyataan tentang perubahan perilaku (kognitif, psikomotorik, afektif) yang diinginkan terjadi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran; (d) Isi Pelajaran: segala informasi berupa fakta, prinsip, dan konsep yang diperlukan untuk mencapai tujuan; (e) Metode: cara yang teratur untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapat informasi yang dibutuhkan mereka untuk mencapai tujuan; (f) Media: bahan pengajaran dengan atau tanpa peralatan yang digunakan untuk menyajikan informasi kepada siswa; (g) Evaluasi: cara tertentu yang digunakan untuk menilai suatu proses dan hasilnya.²²

Pembelajaran di Sekolah Dasar hendaknya memperhatikan empat prinsip agar dapat mengetahui

1. Prinsip latar belakang, adalah keadaan siswa telah mengetahui hal lain secara langsung atau tidak langsung dengan bahan yang akan dipelajari.
2. Prinsip belajar sambil bekerja sangat penting karena pengalaman yang diperoleh melalui bekerja tidak mudah dilupakan
3. Prinsip belajar dan bermain, penting karena bermain merupakan keaktifan siswa yang dapat menimbulkan suasana yang menyenangkan. Suasana seperti ini akan mendorong siswa untuk belajar lebih giat
4. Prinsip belajar keterpaduan, mengharapkan agar guru dalam menyampaikan materi hendaknya mengaitkan antara materi yang satu dengan materi yang lain, baik dalam satu bidang studi maupun dengan bidang studi lainnya. Pemaduan konsep dapat membuat materi pelajaran lebih bermakna.²³

²²Lestari, Mega, *Metode Pembelajaran Siswa* (Jakarta: Grafindo, 2012), hlm 212.

²³Mikarsa, S, *Perkembangan Pendidikan Sekolah Dasar* (Yogyakarta, UGM press, 2007), hlm 74.

²⁴Sartono Kartodirdjo, *Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: PT Gramedia Utama, 1992), hlm. 2.

Langkah yang sangat penting dalam membuat analisis sejarah ialah menyediakan suatu kerangka pemikiran yang mencakup berbagai konsep dan teori yang akan dipakai dalam membuat analisis tersebut.²⁴ Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan sejarah pendidikan. Sejarah pendidikan adalah cerita yang tersusun rapi dari suatu periode ke periode lainnya atau selanjutnya yang berkaitan dengan sebuah usaha penyelenggaraan pendidikan. Aspek yang dikaji adalah usaha dan rekayasa manusia dalam mencerdaskan dirinya dan masyarakat sekitarnya, mengembangkan potensinya, terutama mewariskan kecerdasan dan potensi tersebut kepada generasi selanjutnya, untuk melestarikan dan mendialektikan tradisi-budayanya.²⁵ Proses dalam dunia pendidikan bagaikan suatu investasi, untuk memperoleh pengetahuan, kerangka referensi, dan kemampuan berfikir serta mengekspresikan diri. Pendidikan menjadi penting melalui hidup, khususnya sebagai kebangkitan pribadi pada posisi yang melibatkan penilaian dan tanggung jawab. Dengan demikian tujuan pendidikan tidak dapat direduksi hanya untuk sekadar memenuhi kebutuhan pasaran kerja. Institusi sekolah yang hanya berorientasi pada pemenuhan lapangan kerja akan mereduksi hakikat pendidikan dan kemanusiaan itu sendiri.²⁶ Pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia, dalam perkembangannya banyak menimbulkan institusi. Salah satu institusi pendidikan adalah lembaga sekolah. Bila keberadaan sekolah sebagai lembaga pendidikan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan zaman dan masyarakatnya. Keberadaan dan substansi serta arah pendidikan selalu mencerminkan warna budaya di mana lembaga pendidikan tersebut berada. Kuatnya pengaruh budaya cenderung menyebabkan lembaga pendidikan sebagai media konservasi.²⁷

Menurut Undang-Undang No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan

²⁵Muhammad Rifa'i, *Sejarah Pendidikan Nasional: Dari Masa Klasik Hingga Modern* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 8.

²⁶Hariyono, *Mempelajari Sejarah Secara Efektif* (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995), hlm. 8.

²⁷Hariyono, *Mempelajari Sejarah Secara Efektif*, hlm. 148.

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan, masyarakat, bangsa, dan negara. Lembaga pendidikan merupakan lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menuju ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar.²⁸

Ketika kebudayaan dan peradaban manusia semakin maju disamping terjadinya pertumbuhan penduduk dunia yang begitu cepat, yang kemudian menimbulkan banyak perubahan pada struktur sosial dan ekonomi, maka pola kehidupan masyarakat terasa semakin hari menjadi semakin sulit dan berat. Masyarakat berkembang menjadi semakin kompleks dengan sistim pembagian kerja yang tajam, sehingga orang perlu banyak belajar hal-hal yang baru supaya dapat menyesuaikan diri dengan masyarakatnya yang selalu berubah. Kemampuan orang tua tidak sama dan terbatas, disisi yang lain kebutuhan belajar yang dikehendaki oleh warga masyarakat harus tetap dipenuhi. Sebagai akibatnya muncullah kemudian apa yang disebut pendidikan formal, pendidikan di sekolah yang sebagian tanggung jawab pendidikan yang seharusnya dikerjakan oleh orang tua terhadap anak-anaknya dilimpahkan kepada para “cerdik cendekia” yang tergabung dalam organisasi yang disebut “sekolah”, sehingga sampai dengan saat sekarang ini pun istilah pendidikan masih sering diinterpretasikan sama dengan sekolah.

Pendidikan formal dengan demikian merupakan sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga persekolahan yang dalam tindak operasionalnya memiliki legalitas dan formalitas serta beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Sekolah sebagai pusat pendidikan formal merupakan perangkat masyarakat yang disertai kewajiban memberikan pendidikan. Perangkat ini ditata dan dikelola secara formal, mengikuti haluan yang pasti dan diberlakukan di masyarakat bersangkutan. Haluan tersebut tercermin di dalam falsafah dan tujuan, penjenjangan, kurikulum, pengadministrasian serta pengelolaannya.²⁹ Pendidikan non-formal adalah setiap kegiatan pendidikan yang diorganisasikan di luar sistem persekolahan, baik yang

²⁸Rifa'i, *Sejarah Pendidikan Nasional*, hlm. 162-163.

²⁹Bambang Sarwoko, *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah* (Semarang: IKIP Semarang Press, 1989), hlm. 4-5.

diselenggarakan secara terpisah maupun secara terpadu untuk kegiatan-kegiatan yang amat penting dalam rangka untuk melayani warga belajar mencapai tujuan belajar. Pendidikan non-formal hampir selalu berurusan dengan usaha bimbingan, pembinaan, dan pengembangan warga masyarakat yang mengalami keterlantaran pendidikan, dari keadaan yang kurang tahu menjadi tahu, dari kurang trampil menjadi trampil, dari kurang melihat ke masa depan menjadi seorang yang memiliki sikap mental pembaharuan dan pembangunan.³⁰

Dilihat dari sisi institusi, institusi pendidikan adalah organisasi sistem kegiatan manusia dalam arti luas, tetap, universal dan tidak terikat satu dengan yang lain sebagai komponen-komponen yang terdapat secara nyata di dalam suatu unit kebudayaan. Peranan sekolah sebagai institusi jauh lebih luas daripada sekedar tempat belajar. Pendirian dan penyelenggaraan sebuah sekolah, pada dasarnya didukung dan dijiwai oleh suatu kebudayaan tertentu. Sekolah adalah salah satu bentuk ikatan kerja sama sekelompok orang, yang bermaksud mencapai suatu tujuan yang disepakati bersama. Sebuah lembaga pendidikan seperti sekolah tidak boleh diartikan sekedar sebuah gedung saja, tempat anak-anak berkumpul dan mempelajari sejumlah materi pengetahuan. Peranan sebagai lembaga pendidikan dibatasi oleh norma-norma yang terdapat di dalam kebudayaan yang mendukungnya. Peranan sekolah sebagai lembaga pendidikan adalah mengembangkan potensi manusiawi yang dimiliki anak-anak agar mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan sebagai manusia, baik secara individual maupun sebagai anggota masyarakat.

Hal itu bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai yang serasi dengan kebudayaan di lingkungan masyarakat yang menyelenggarakan sekolah sebagai lembaga pendidikan. Adapun fungsi sekolah adalah meneruskan, mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan suatu masyarakat, melalui kegiatan ikut membentuk kepribadian anak-anak agar menjadi manusia dewasa yang mampu berdiri sendiri di dalam kebudayaan dan masyarakat sekitarnya. Sekolah tidak sekedar sebagai berfungsi untuk mempertahankan kebudayaan yang ada, tetapi juga

³⁰Bambang Sarwoko, *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*, hlm. 8-9.

mengembangkannya sesuai dengan martabat manusia yang kehidupannya selalu dipenuhi dengan kebutuhan yang semakin meningkat.³¹

Penyelenggaraan pendidikan menjadi Standar Nasional Pendidikan, yaitu ialah suatu kriteria atau standar minimal terkait pelaksanaan sistem pendidikan yang ada di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Replubik Indonesia. Fungsi dari Standar Nasional Pendidikan ini ialah sebagai dasar melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas dan tujuan Standar Pendidikan Nasional baik yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak swasta, dari pendidikan Prasekolah sampai Pendidikan Tinggi, supaya melahirkan warga negara Sosialis, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya Masyarakat Sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun materiil dan yang berjiwa Pancasila, yaitu a) Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa; b) Perikemanusiaan yang adil dan beradab; c) Kebangsaan; d) Kerakyatan; dan e) Keadilan Sosial, seperti dijelaskan dalam Manipol/Usdek. Tujuan pendidikan nasional

Undang-undang yang mengatur tentang pendidikan ialah UU No. 4 tahun 1950 jo UU No. 12 tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan di sekolah dan UU No. 22 tahun 1961 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam pelaksanaannya kemudian diatur oleh keputusan Presiden No. 34 tahun 1972 tentang Pembinaan Seluruh Pendidikan dan Latihan yang disusul oleh Instruksi Presiden No. 15 tahun 1974 tentang Pedoman Pelaksanaan Kepres No. 34 tahun 1972. Untuk sekolah-sekolah, tujuannya diuraikan dalam Surat Keputusan Menteri P dan K tentang pembakuan Kurikulum, No. 008 c/U/1975 untuk sekolah dasar, No. 008d/U/1975 untuk Sekolah Menengah Tingkat Atas. Untuk Pendidikan Tinggi, dasar dan arah pembinaan serta pengembangannya diuraikan dalam Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi sesuai dengan Keputusan Menteri P dan K No. 0140/U/1975.³²

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 34 ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah,

³¹Hadari Nawawi,*Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas sebagai Lembaga Pendidikan* (Jakarta: PT Gita Karya, 1982), hlm. 25-27.

³²Moehadi, *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Tengah*, hlm. 112.

pemerintah daerah, dan masyarakat. Maka muncul dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik yang berasal dari pemerintah pusat (BOS Nasional) maupun pemerintah daerah (BOS Daerah) untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Secara lebih detail pengaturan tentang pendanaan pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pasal 3 tentang biaya pendidikan. Biaya satuan pendidikan atau unit cost pendidikan yang tertera dalam PP Nomor 48 tahun 2008 meliputi biaya investasi lahan pendidikan, biaya investasi, biaya personalia (gaji, tunjangan struktural, dan fungsional), biaya non personalia (bantuan biaya pendidikan dan beasiswa). Anggaran pendidikan setiap tahunnya selalu meningkat, sedangkan dana BOS dari pemerintah tidak mencukupi untuk memenuhi unit cost yang dibutuhkan oleh pihak sekolah dalam hal penyelenggaraan sekolah dan kegiatan pembelajaran. Untuk sekolah berprestasi seperti SD Negeri 01 Ungaran membutuhkan banyak bantuan dana untuk menunjang segala aktifitas yang dilakukan oleh pihak sekolah. Maka itu peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dengan dibentuknya Komite Sekolah.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah metode sejarah, yaitu proses menguji dan menganalisis rekaman dan peninggalan masa lampau.³³ Metode Sejarah mencakup empat tahap penting yang harus dilakukan dalam penelitian sejarah yang meliputi heuristik sebagai tahap pertama. Heuristik adalah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, atau materi sejarah.

Dalam heuristik dilakukan pengumpulan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber Primer adalah sumber yang belum diolah, sementara sumber sekunder adalah sumber yang sudah diolah dalam bentuk buku-buku, artikel-artikel, dan sebagainya.³⁴ Sumber-sumber primer dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuknya, yaitu sumber benda (bangunan, perkakas, senjata), sumber tertulis (dokumen), dan

³³Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1983), hlm. 32.

³⁴G.J Reiner, *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 113.

sumber lisan (hasil wawancara).³⁵ Penyajian data dilakukan secara naratif melalui penyusunan data dan informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Verifikasi ulang dilakukan dengan memeriksa ulang hasil wawancara dan studi pustaka secara seksama, mengatur temuan diantara seperangkat data yang lain, dan membandingkan temuan dengan hasil penelitian sejenis. Proses itu sekaligus bertujuan untuk melakukan validasi data, sebab kegiatan dalam verifikasi data bertujuan untuk mengkaji kebenaran, dan kekokohan, serta kecocokan data.³⁶ Metode penulisan sejarah ini adalah prosedur analitis yang ditempuh sejarawan untuk menganalisis kesaksian yang ada.

Tahap *pertama*, heuristik atau penelusuran sumber sejarah adalah suatu teknik untuk memperoleh jejak-jejak masa lalu.³⁷ sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua macam, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari pada seorang saksi dengan mata-kepala sendiri atau saksi dengan pancaindera yang lain, atau dengan alat mekanis seperti diktafon, yakni orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang dikisahnya.³⁸ Sumber primer merupakan sumber yang utama karena menyangkut validitas, otentisitas, dan kredibilitas dari informasi di dalamnya; sedangkan sumber sekunder yang akan memperkuat dan melengkapi kekurangan informasi dari sumber primer.

Pada penelitian ini, penggunaan sumber tertulis yang pertama adalah arsip profil SD Negeri 01 Ungaran, beberapa dokumen mengenai laporan pertanggung jawaban yang dimiliki oleh Komite Sekolah, arsip yang berbentuk CD yang di dalamnya adalah hasil bantuan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh Komite Sekolah. Selain sumber tertulis, penelitian ini juga menggunakan sumber lisan

³⁵Wasino, *Dari Riset Hingga Tulisan Sejarah* (Semarang: UNNES Press, 2007), hlm. 19.

³⁶Huberman Miles, *Analisis data Kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru* (Jakarta: UI Press, 1992), hlm 16-19.

³⁷G. J. Renier, *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 113.

³⁸ Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto, hlm.35.

melalui wawancara mendalam. Sumber lisan adalah kesaksian pelaku atau saksi mata peristiwa yang terjadi, bukan opini atau pendapat pribadi seseorang. Hal penting dalam tahap ini adalah relevansi antara tema dan sumber yang dikumpulkan. Semakin banyak informasi yang dapat dikumpulkan semakin mudah pula proses dalam penulisan sejarah.³⁹ Sumber primer lisan yang diperoleh melalui wawancara ini digunakan tidak saja sebagai pelengkap tetapi sekaligus pembanding sumber tertulis.⁴⁰ Hasil wawancara beberapa tokoh yang representatif diseleksi dan dibanding-bandingkan, sehingga diperoleh data yang objektif. Wawancara dilakukan dengan para informan, seperti Winarto sebagai mantan Kepala Sekolah SD Negeri 01 Ungaran sejak tahun 2013; Sri Dwi Winarsih sebagai mantan Kepala Sekolah SD Negeri 01 Ungaran sejak tahun 2018; Hadi Astuti sebagai Guru Bahasa Indonesia SD Negeri 01 Ungaran sejak tahun 2005; Sutejo Kuwait Widodo sebagai mantan ketua Komite Sekolah sejak tahun 2017; Nurul Fajarwati sebagai anggota Tata Usaha SD Negeri 01 Ungaran sejak tahun 2005; Rukayah sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 01 Ungaran sejak tahun 2019; Ristinah sebagai guru Wali Kelas VA SD Negeri 01 Ungaran sejak tahun 1990.

Selain sumber primer, penelitian ini juga menggunakan sumber sekunder untuk melengkapi informasi yang telah diperoleh. Sumber sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap buku-buku karya para sarjana dan ahli yang relevan serta artikel-artikel yang dimuat dalam majalah dan surat kabar sezaman atau bentuk penerbit yang lain. Sumber-sumber ini berguna untuk melengkapi sumber-sumber primer dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peristiwa yang diteliti. Sumber sekunder diperoleh dari perpustakaan Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang, Perpustakaan Widya Puraya Undip, Perpustakaan Wilayah Provinsi Jawa Tengah di Semarang.

Tahap *kedua* adalah kritik sumber. Setelah pengumpulan sumber dipandang cukup, tahap berikutnya dilakukan pengujian sumber (kritik sumber) melalui kritik ekstern dan intern.⁴¹ Kritik ekstern dilakukan untuk menguji otentisitas atau keaslian

³⁹Abdurahman Suryomihardjo, *Pemahaman Bangsa dan Masalah Historiografi* (Jakarta: Idayu, 1975), hlm.139.

⁴⁰Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, hlm.35.

⁴¹Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, hlm.80-117.

sumber, sedangkan kritik intern dilakukan untuk memastikan bahwa informasi dalam dokumen itu dapat dipercaya. Sumber primer yang diperoleh berupa sumber tertulis (dokumen) disimpan oleh lembaga-lembaga yang bersangkutan, sedangkan sumber primer lisan diperoleh dari para informan yang terlibat langsung dengan pengajaran pendidikan di SD Negeri 01 Ungaran. Oleh karena itu, setelah proses membandingkan informasi antara satu dengan yang lain dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sumber yang diperoleh tersebut otentik dan kredibel.

Tahap ketiga, interpretasi sumber yang saling mengkait-kaitkan antara fakta yang satu dengan fakta lainnya. Di dalam tahap ini penyeleksian fakta untuk mendapatkan relevansi dalam penyusunan topik penulisan sejarah dan melakukan serialisasi fakta-fakta yang diperoleh. Serialisasi memuat unsur kronologi, kausalitas, dan imajinasi dalam penyusunan fakta-fakta yang ada. Penelitian sejarah pendidikan dilakukan secara diakronis dan sinkronis guna memperluas persoalan pendidikan lebih lanjut. Sejarah pendidikan dimaksudkan untuk mengakibatkan kesadaran, kesatuan budaya, profesi guru, kebanggaan lembaga pendidikan tertentu. Sejarah pendidikan erat sekali kaitannya dengan sejarah intelektual dan sejarah sosial.⁴²

Tahap *keempat* adalah penulisan sejarah atau historiografi. Pada tahap ini fakta-fakta yang telah disintesis dipaparkan dalam bentuk tulisan sejarah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar memudahkan pembaca untuk memahami upaya rekonstruksi penulisan. Sejarah pendidikan masih menggunakan pendekatan lama atau tradisional yang umumnya diakronis yang kajiannya berpusat pada sejarah dari ide-ide dan pemikiran-pemikiran besar dalam pendidikan, atau sejarah dari sistem pendidikan dan lembaga-lembaga, atau sejarah perundang-undang dan kebijakan umum dalam bidang pendidikan. Pemerintah ditujukan kepada masalah-masalah yang timbul dalam pendidikan, yang dampak-dampaknya (positif atau pun negatif) dirasakan terutama oleh masyarakat.⁴³ Melalui penulisan sejarah ini, diharapkan peran serta masyarakat dalam pengembangan sekolah berprestasi SD Negeri 01 Ungaran dapat dipahami secara bulat dan utuh

⁴²Suhartono W. Pranoto, *Teori & Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Graha Ilmu), hlm.97.

⁴³Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, hlm.260.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul “Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Sekolah Berprestasi di SD Induk Ungaran dari Tahun 2010-2017”. Untuk memudahkan pemahaman, maka penulisan dibagi dalam lima bab sebagai berikut.

Bab I merupakan pendahuluan, yang meliputi latar belakang permasalahan, ruang lingkup, tinjauan pustaka, pendekatan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi selang pandang Sekolah Dasar Induk Ungaran dari sejak menjadi tiga sekolah berbeda 2010-2017 di Kabupaten Semarang. Bab ini membahas tentang kondisi geografis dan demografis, kondisi sosial-ekonomi, dan kondisi sosial-budaya masyarakat Kabupaten Semarang. Bab ini dibangun sebagai konteks dari kondisi SDN 01 Ungaran, SDN 03 Ungaran, SDN 06 Ungaran tahun 2010 mengubah nama menjadi SD Negeri 01 Ungaran yang berprestasi pada tahun 2017.

Bab III membahas mengenai kisah pendirian sekolah dan dinamika pendidikan yang terjadi SD Induk Ungaran tahun 2010-2017 dan menceritakan sedikit mengenai perubahan status sekolah yang dialami oleh SD Induk Ungaran. Bab ini memiliki tiga sub-bab. Sub-bab pertama membahas mengenai kebijakan pendidikan nasional dan pendirian Sekolah Dasar Negeri Induk Ungaran; Sub-bab kedua membahas profil yang dimiliki oleh SD Induk Ungaran di dalamnya akan dibahas mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pihak sekolah, visi dan misi Sekolah Dasar Induk Ungaran, struktur organisasi; dan Sub-bab ketiga akan membahas strategi kurikulum yang diberlakukan di SD Induk Ungaran.

Bab IV akan dibahas mengenai peran serta masyarakat dalam menunjang prestasi SD Negeri 01 tahun 2010-2017, dalam bab ini akan menceritakan dinamika yang terjadi di dalam badan Komite Sekolah dan pengembangan prasarana serta peningkatan kualitas pembelajaran.

Skripsi ini ditutup dengan Bab V yang berisi simpulan. Bab ini menyampaikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam skripsi ini.